

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA KUALITAS LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

I Wayan Subrata¹
Gerianta Wirawan Yasa²
Ida Bagus Putra Astika³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Email: wynsubrata27@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan barang milik daerah. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data tentang sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan melalui penyebaran kuisioner, sedangkan pengumpulan data tentang kualitas laporan barang milik daerah dilakukan melalui pengevaluasian tingkat kesesuaian laporan barang milik daerah dengan kriteria yang dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan barang milik daerah.

Kata kunci: *kualitas laporan barang, sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi*

ABSTRACT

This research aimed to get empirical evidence of the effect of the internal control system, human resource ability and information technology utilization on quality of local government assets report. The amount of samples in this research were 42 work units (SKPD) on Gianyar local government, that selected by purposive sampling method. The data about internal control systems, human resource ability and information technology utilization was collected by the use of questionnaire, while the data about quality of local government assets report was collected by evaluate the compliance level of assets report with established criteria based Permendagri No. 17 in 2007. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The result of analysis showed that the internal control system, human resource ability and information technology utilization has positive effect on quality of local government assets report.

Keywords: *quality of assets report, internal control systems, human resource ability, information technology utilization*

PENDAHULUAN

Harapan besar akan terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik di daerah-daerah muncul dengan diterapkannya desentralisasi dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal yaitu melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu indikator dari *good governance* adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kualitas LKPD dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, LKPD diaudit oleh BPK RI dan LKPD dianggap baik apabila memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 dan 2016 BPK RI yang ditampilkan dalam Tabel 1, untuk Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah memperoleh opini WTP untuk laporan keuangannya pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015.

Tabel 1
Opini LKPD Tahun 2011-2015 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Bali

Pemerintahan	Opini LKPD Tahun 2011 s.d 2015				
	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Bali	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
Kabupaten Badung	WTP DPP	WTP	TW	WTP	WTP
Kabupaten Bangli	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
Kabupaten Buleleng	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Kabupaten Gianyar	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Kabupaten Jembrana	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Kabupaten Karangasem	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
Kabupaten Klungkung	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
Kabupaten Tabanan	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
Kota Denpasar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : IHPS I BPK RI Tahun 2015 dan Tahun 2016

Keterangan :

- WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
- WTP DPP = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
- WDP = Wajar Dengan Pengecualian
- TW = Tidak Wajar
- TMP = Tidak Memberikan Pendapat

Walaupun Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mendapatkan opini WTP, BPK masih menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Salah satu pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 adalah penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Gianyar yang belum memadai (BPK Provinsi Bali, 2015). Hal yang belum disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai terkait penatausahaan aset tetap di Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 adalah belum dilakukannya rekonsiliasi aset tetap antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan Bagian Pengelolaan Aset dan Perawatan secara periodik dan cermat sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian antara laporan SKPD dengan Bagian Pengelolaan Aset dan Perawatan atas akun aset tetap.

Sedangkan pada audit LKPD Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2015 terdapat beberapa koreksi BPK RI atas pencatatan aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya dalam laporan barang milik daerah yang dibuat. Masih adanya ketidaksesuaian antara laporan SKPD dengan Bagian Pengelolaan Aset dan Perawatan atas akun aset tetap serta masih adanya koreksi BPK atas pencatatan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa laporan aset tetap atau barang milik daerah yang dibuat masih belum maksimal kualitasnya, sehingga perlu ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi mengenai barang milik daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah tertuang dalam neraca, yang terinci dalam dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Laporan Barang Pengguna/Laporan Kuasa Pengguna Barang (LBP/LKPB). Besaran nilai laporan barang milik daerah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap seluruh laporan keuangan SKPD, yang menjadikan pertanggungjawaban atas barang milik daerah menjadi sangat penting, sehingga data barang milik daerah yang akurat tentunya sangat dibutuhkan agar laporan keuangan yang disusun dapat tersaji secara wajar.

Masalah pelaporan aset atau barang milik daerah masih menjadi topik utama dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK RI. Grubisic *et al.*, (2009) menyatakan bahwa pengelolaan aset menjadi bagian integral atas reformasi sektor publik, hal ini diakibatkan banyaknya aset publik yang nilainya

tidak jelas, sehingga menyebabkan penilaian aset yang tidak jelas. Pengendalian internal merupakan salah satu mekanisme yang paling penting memberikan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengendalikan operasi mereka (Jones, 2008). Dalam serangkaian proses pengelolaan barang milik daerah hingga menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan sangatlah rentan terjadi kecurangan jika pengendalian intern di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berjalan secara efektif.

Feng *et al.*, (2015) mengungkapkan bahwa pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara ekonomi memiliki efek signifikan pada operasi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh McMullen *et al.*, (1996) juga menunjukkan bahwa hubungan antara pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan bersifat signifikan untuk perusahaan yang mengeluarkan laporan pengendalian intern manajemen, karena manajemen yang mengeluarkan laporan pengendalian intern akan menindaklanjuti kelemahan yang ada pada pengendalian intern sehingga hasilnya bermuara pada kualitas laporan keuangan. Hardiman *et al.*, (1985) mengemukakan bahwa evaluasi dari sistem pengendalian intern akan digunakan untuk menilai keandalan informasi keuangan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan unit-unit dalam pemerintahan. Efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan supaya menjadi lebih andal dilaksanakan melalui pencegahan dan deteksi prosedur serta estimasi *error* (Doyle *et al.*, 2007). Apabila pengendalian internal dalam sistem akuntansi telah ditetapkan, maka informasi akuntansi yang dihasilkan akan lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit.

Akuntansi pemerintah dengan basis akrual relatif lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis kas menuju akrual sehingga membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi akuntansi yang memadai (Kementerian Keuangan, 2014). Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Agar mampu memberi kontribusi secara optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi, maka sumber daya manusia harus dikelola sebaik mungkin. Rynandi (2008) mengemukakan bahwa penerapan dan pelaksanaan sistem akuntansi barang dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang menangani sistem akuntansi barang mengerti dan memahami tentang sistem akuntansi barang tersebut. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang bisa mendorong terciptanya laporan barang milik daerah yang berkualitas.

Yasser (2010) dalam Haryanto (2013) mengemukakan bahwa pelaksanaan penatausahaan barang yang belum berjalan optimal berpengaruh pada keakuratan data barang yang tersaji. Aktivitas penatausahaan barang milik daerah sampai menjadi laporan barang milik daerah tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah. Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah data yang besar, meminimalisasi terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Aplikasi dan komputer akan membantu penyusunan laporan keuangan dan aset menjadi lebih mudah, cepat dan akurat sehingga laporan dapat tersedia saat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Gianyar, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan barang milik daerah dengan menggunakan variabel bebas sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (a) apakah sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan barang milik daerah?, (b) apakah kemampuan sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan barang milik daerah?, (c) apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada kualitas laporan barang milik daerah?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan barang milik daerah.

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan dukungan pada penerapan *stewardship theory* dan teori regulasi dalam menjelaskan pengaruh sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan barang milik daerah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan maupun kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah, khususnya terkait dengan penyusunan laporan barang milik daerah sehingga kualitas laporan barang milik daerah menjadi lebih baik dan tertib.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. Menurut Donaldson dan Davis (1991), *Stewardship Theory* menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*/pelayan) bagi kepentingan *principal*. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai *steward* dibandingkan sebagai *agent*. Hal tersebut terungkap penelitian yang dilakukan oleh Morgan *et al.*, (1996) dan Slyke (2006).

Menurut Podrug (2011), *stewardship theory* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) dengan beberapa asumsi-asumsi dasar. Dalam struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Gianyar, *Stewardship Theory* bisa terjadi antara Kepala Daerah (Bupati) dengan kepala SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah. Kepala Daerah dapat bertindak sebagai *principal* yang mempercayakan pengelolaan barang milik daerah kepada kepala SKPD selaku *steward*. Kepala Daerah menginginkan barang milik daerah dapat dikelola dengan baik oleh masing-masing SKPD dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik. Sebagai pihak yang diberi kepercayaan, maka kepala SKPD akan mempertanggungjawabkan pengelolaan barang milik daerah di instansinya kepada Kepala Daerah melalui pengungkapan laporan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini juga menggunakan teori regulasi sebagai teori pendukung. Teori regulasi disampaikan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi permintaan/*demand* dan legislatif sebagai *supply*. Menurut Scott (2009:484) ada dua teori regulasi yaitu *public interest theory* / teori kepentingan publik dan *interest group theory* / teori kelompok kepentingan. Berdasarkan *public interest theory*, badan regulator (biasanya pemerintah) akan melakukan tindakan yang terbaik untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Terkait hal tersebut Pemerintah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang diikuti beberapa ketentuan lain yang pada intinya mewajibkan kepada seluruh penyelenggaran pemerintahan untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel.

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 juga mengatur setiap Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah yang digunakan sebagai bahan untuk

menyusun neraca Pemerintah Pusat/Daerah. Penyajian informasi laporan aset sangat penting dalam mengetahui posisi keuangan, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Wibisono (2009), untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset telah dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern atas hal tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui SPIP, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Stewardship Theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah di setiap Pemerintah Daerah dengan jumlahnya yang sangat banyak menjadi tuntutan oleh para *stakeholder* dalam hal pencatatan sehingga menjadi laporan barang milik daerah yang berkualitas. Putra (2012) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah karena keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan.

Penelitian sebelumnya tentang sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Indriasari (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif pada nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2011), Wansyah (2012), Yudianta (2012) dan Mahaputra (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₁ : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah.

Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting dalam organisasi. Berdasarkan *Stewardship Theory*, manajemen organisasi dipandang sebagai *stewards*/penatalayanan yang akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai *steward*, menerima amanah untuk menyajikan informasi keuangan dan barang pemerintah yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi tersebut melalui wakil-wakilnya. Kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Guna menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut (Tjiptoherijanto, 2001). Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan.

Sedangkan kompetensi dijelaskan oleh Deist dan Winterton (2005) sebagai faktor kunci yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. Selanjutnya Wu (2008) mendefinisikan kompetensi dalam akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan bagi seseorang untuk bekerja sebagai seorang akuntan.

Penelitian yang dilakukan oleh Xu, *et al.*, (2003) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kritis yang menentukan kualitas informasi akuntansi. Keandalan sistem harus didukung oleh keandalan SDM dan harus dikontrol agar dapat berjalan dengan baik. Haryanto (2013) dalam penelitiannya membuktikan adanya pengaruh positif kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan aset daerah, demikian juga dengan hasil penelitian Andriani (2010), Wansyah (2012) dan Nurillah (2014) yang juga mengungkapkan adanya pengaruh positif kapasitas sumber daya manusia terhadap laporan keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman, keterampilan dan kemampuan pegawai dapat meningkatkan kualitas dari laporan yang akan mereka buat. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₂ : Kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah.

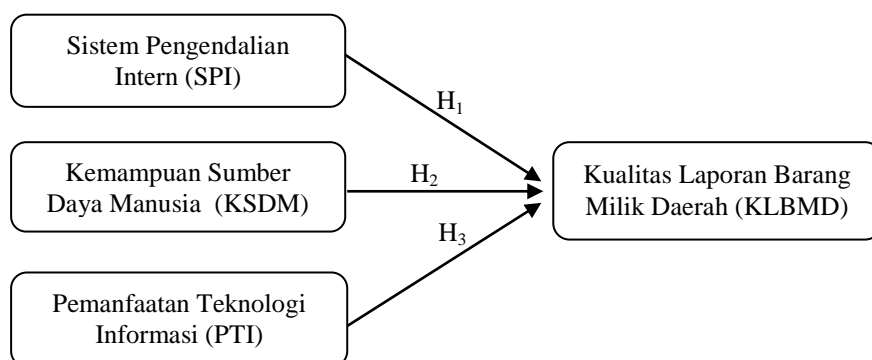
Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. *Stewardship Theory* memandang Pemerintah Daerah selaku *steward* sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik, dengan melaksanakan tugas

dan fungsinya secara tepat serta membuat pertanggung jawaban keuangan dan aset daerah yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk dapat menghasilkan laporan keuangan dan barang milik daerah yang berkualitas, maka *stewards* (manajemen) akan mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya. Sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi, maka komputer merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan lainnya menjadi lebih tepat waktu (Laksamana, 2002). Macmillan (2003) menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat penyesuaian penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual dari basis kas. Hasil penelitian Hullah (2012) dan Karmila (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang / aset daerah dibuktikan dalam penelitian penelitian Darno (2012) dan Haryanto (2013). Hasil tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi yang digunakan dengan tepat akan dapat mendukung terwujudnya laporan aset yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hipotesis yang dirumuskan, maka disusun konsep penelitian yang menjelaskan pengaruh sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan barang milik daerah, yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang berjumlah 47 SKPD. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014 dan 2015, masih ditemukan pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas LKPD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014, yang salah satunya terkait dengan penatausahaan aset yang dianggap belum memadai, serta masih terdapat koreksi BPK RI dalam audit LKPD Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2015 pada aset tetap. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada kualitas laporan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer tentang sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dikumpulkan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuisisioner. Sedangkan data primer tentang kualitas laporan barang milik daerah dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen di lokasi penelitian, seperti laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan, yang kemudian dievaluasi tingkat kesesuaiannya menggunakan kriteria yang dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan tahun 2015 serta laporan barang semester I tahun 2016 pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang berjumlah 47 SKPD. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan tertentu (Jogiyanto, 2007:74). Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang pengurus barangnya memiliki masa jabatan sebagai pengurus barang minimal 1 (satu) tahun. Berdasarkan kriteria di atas, terdapat 5 (lima) SKPD yang tidak memenuhi kriteria sebagai sampel karena masa jabatan pengurus barangnya kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 42 SKPD, dengan 42 orang pengurus barang pada SKPD tersebut sebagai responden.

Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI), Kemampuan Sumber Daya Manusia (KSDM), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI). Sedangkan Kualitas Laporan Barang Milik Daerah (KLBMD) merupakan variabel terikat dalam penelitian ini.

Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Variabel sistem pengendalian intern diukur menggunakan indikator: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur berupa kuisisioner yang terdiri atas 19 (sembilan belas) item pernyataan yang diadopsi dan dimodifikasi dari PP Nomor 60 Tahun 2008 dan instrumen penelitian Irwan (2011) dan Pratiwi (2012) dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point.

Kemampuan sumber daya manusia didefinisikan sebagai kemampuan dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan semua fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kemampuan sumber daya manusia adalah: tanggung jawab, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Sedangkan instrumen untuk mengukurnya berupa kuisisioner yang terdiri atas 15 (lima belas) item pernyataan yang diadopsi dan dimodifikasi dari instrumen

penelitian Indriasari (2008) dan Irwan (2011) dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point.

Pemanfaatan teknologi informasi didefinisikan sebagai tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Variabel pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator: perangkat, pengelolaan data, dan perawatan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur berupa kuisioner yang terdiri atas 7 (tujuh) item pernyataan yang diadopsi dan dimodifikasi dari instrumen penelitian Indriasari (2008) dengan pengukuran skala likert lima point.

Kualitas laporan barang milik daerah didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dan aset sehingga dapat memenuhi tujuannya. Untuk mengukur variabel kualitas laporan barang milik daerah digunakan indikator: andal, tepat waktu dan lengkap. Instrumen yang digunakan untuk mengukur berupa kriteria untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian laporan barang milik daerah yang terdiri atas 14 (empat belas) kriteria berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Tama (2015).

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, maka sebelum data dianalisis dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda akan diamati *goodness of fit*, yaitu: uji kelayakan model (uji F), koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 42 responden dalam penelitian ini, dan data tentang variabel sistem pengendalian intren, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti, sedangkan data tentang variabel kualitas laporan barang milik daerah diperoleh dari hasil pengevaluasian laporan barang milik daerah pada masing-masing SKPD oleh peneliti dengan menghitung tingkat kesesuaian laporan barang milik daerah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. *Respon rate* dari kuesioner yang disebar adalah sangat baik yaitu mencapai 100%. Mengingat data yang disampaikan oleh responden adalah lengkap, maka seluruh hasil kuesioner yang terhimpun dapat dipergunakan.

Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian yang berupa kuisisioner diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa kuisisioner yang digunakan valid dan reliabel. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi antar skor tiap-tiap butir pernyataan dengan skor total kuisisioner. Hasil uji validitas instrumen pada masing-masing variabel sistem pengendalian intren, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) yang lebih besar dari 0,3 dengan signifikansi dibawah 0,05 sehingga semua butir pernyataan dapat dinyatakan valid. Selanjutnya pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Hasil pengujian reliabilitas instrumen pada masing-masing variabel sistem pengendalian intren, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,70 maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditampilkan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, rata-rata dan simpangan baku. Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Simpangan Baku
Kualitas Laporan Barang Milik Daerah (KLBMD)	42	0,64	0,93	0,86	0,068
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	42	30,52	74,71	52,18	10,90
Kemampuan Sumber Daya Manusia (KSDM)	42	24,14	54,54	41,69	7,06
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	42	12,43	30,89	21,37	4,30

Sumber: data diolah (2016)

Pengukuran rata-rata merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data, sedangkan simpangan baku merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Berdasarkan Tabel 2, simpangan baku variabel kualitas laporan barang milik daerah adalah 0,068, simpangan baku variabel sistem pengendalian intern sebesar 10,90, simpangan baku variabel kemampuan sumber daya manusia adalah 7,06 dan simpangan baku variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 4,30. Secara keseluruhan nilai simpangan baku dari seluruh variabel lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, maka sebaran data dapat dikatakan baik.

Rata-rata tingkat kesesuaian laporan barang milik daerah adalah sebesar 0,86 yang termasuk dalam klasifikasi kualitas laporan barang milik daerah yang baik. Rata-rata penilaian responden terhadap sistem pengendalian intern adalah sebesar 52,18 yang termasuk dalam klasifikasi sistem pengendalian intern yang

cukup baik. Rata-rata jawaban responden untuk variabel kemampuan sumber daya manusia sebesar 41,69. Nilai ini masuk dalam klasifikasi kemampuan sumber daya manusia yang cukup baik. Rata-rata jawaban responden untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 21,37. Nilai ini termasuk dalam klasifikasi pemanfaatan teknologi informasi yang cukup baik.

Dalam penelitian ini dilakukan tiga uji asumsi klasik yaitu: uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila nilai signifikansi atau nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari nilai *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang ditunjukkan dalam Tabel 3 adalah sebesar 0,944 yang lebih besar dari 0,05, sehingga data yang diuji dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	42
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,527
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,944

Sumber: data diolah (2016)

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi yang digunakan. Suatu model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Menurut Ghozali (2013:106), model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah model regresi yang memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan mempunyai angka *Tolerance* lebih dari 0,10.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	0,827	1,210
Kemampuan Sumber Daya Manusia (KSDM)	0,278	3,603
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	0,290	3,448

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas terhadap variabel penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *glejser* sebagai cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Metode ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai *absolute residualnya*. Jika hasil regresi menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai absolut *residualnya*, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig.
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	-1,408	0,167
Kemampuan Sumber Daya Manusia (KSDM)	-0,924	0,361
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	-0,961	0,343

Sumber: data diolah (2016)

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada semua variabel bebas lebih besar dari *alpha* ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan pada variabel terikat absolut *residual*. Jadi dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini memenuhi syarat uji heteroskedastisitas.

Setelah semua uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian bebas dari asumsi klasik, maka selanjutnya dapat dilakukan uji analisis statistik. Metode statistik yang digunakan dalam analisis regresi adalah dengan regresi linear berganda menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS), dan hasil regresinya ditampilkan dalam Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,504	0,033		15,106	0,000
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	0,001	0,001	0,177	2,127	0,040
Kemampuan Sumber Daya Manusia (KSDM)	0,003	0,001	0,293	2,041	0,048
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	0,008	0,002	0,536	3,809	0,000
2 F_{hitung}	45,450				
Sig	0,000				
3 R^2	0,782				
<i>Adjusted R²</i>	0,765				

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan data dalam Tabel 6, maka persamaan regresinya secara matematis adalah sebagai berikut:

$$KLBM = 0,504 + 0,001 \text{ SPI} + 0,003 \text{ KSDM} + 0,008 \text{ PTI}$$

Berdasarkan hasil uji analisis regresi tersebut, diperoleh informasi terkait hasil uji kelayakan model (Uji F), koefisien determinasi dan uji hipotesis (Uji t).

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:98). Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa uji F menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 45,450 dengan signifikansi 0,000,

dimana nilai tersebut lebih kecil $\alpha = 0,05$. Dengan demikian model penelitian yang digunakan telah layak dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

Nilai *adjusted R²* merupakan indikator koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 6 menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,765, yang memiliki arti bahwa variabilitas variabel kualitas laporan barang milik daerah dapat dijelaskan oleh variabel sistem pengendalian intern, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 76,5 %, sedangkan 23,5 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2013:98). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas pada hasil regresi yang dilakukan dengan bantuan program SPSS. Apabila tingkat signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya apabila tingkat signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Suliyanto, 2011:67).

Hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien β pengaruh variabel sistem pengendalian intern pada kualitas laporan barang milik daerah adalah sebesar 0,001 dan tingkat signifikansi 0,040 yang dibawah $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan barang milik daerah, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin memadai sistem pengendalian intern yang diterapkan pada masing-masing SKPD akan cenderung meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah yang dibuat. Hasil

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) yang mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh positif pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Irwan (2011), Wansyah (2012), Yudianta (2012) dan Mahaputra (2014) yang menyimpulkan adanya pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Para *stakeholder* menuntut adanya akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah dengan jumlahnya yang sangat banyak, dalam hal pencatatan sehingga menjadi laporan barang milik daerah yang berkualitas. Pengendalian internal merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam memberikan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengendalikan operasi mereka. Adapun tujuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Pemda akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur SPI di lingkungan Pemda yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Apabila kelima unsur SPI tersebut bisa diimplementasikan dengan baik dan memadai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, maka kualitas laporan barang yang dihasilkan akan cenderung meningkat.

Besarnya nilai koefisien β yang diperoleh pada uji regresi pengaruh variabel kemampuan sumber daya manusia pada kualitas laporan barang milik daerah sebesar 0,003 dengan signifikansi sebesar 0,048 yang masih dibawah $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh

positif pada kualitas laporan barang milik daerah, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin meningkat kemampuan sumber daya manusia yang mengerjakan laporan barang milik daerah, maka kualitas laporan barang milik daerah yang dihasilkan akan cenderung meningkat.

Sebagai elemen organisasi yang sangat penting, maka sumber daya manusia harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi secara optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia dengan kemampuan yang memadai merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah yang dibuat. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Darno (2012) dan Haryanto (2013) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh positif variabel kemampuan sumber daya manusia pada kualitas laporan barang. Hasil penelitian Andriani (2010), Wansyah (2012), Yudianta (2012) dan Nurillah (2014) juga sejalan dengan hasil penelitian ini, yang mendapatkan adanya pengaruh positif kapasitas sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman, keterampilan dan kemampuan pegawai dapat meningkatkan kualitas laporan yang mereka susun.

Uji regresi pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan barang milik daerah diperoleh nilai koefisien $\beta = 0,008$ dengan nilai signifikansi = 0,000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan barang milik daerah, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin baik teknologi informasi dimanfaatkan dalam penyusunan laporan barang milik daerah akan cenderung meningkatkan kualitas

laporan barang milik daerah yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darno (2012) dan Haryanto (2013), yang menunjukkan adanya pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan barang kuasa pengguna maupun pelaporan aset daerah.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyajian laporan menjadi lebih tepat waktu, dapat menyimpan data dalam jumlah data yang besar, meminimalisasi terjadinya kesalahan sehingga lebih akurat dalam perhitungan, dan biaya pemrosesan yang lebih murah. Teknologi informasi yang dimanfaatkan dengan baik dan tepat akan dapat meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah yang terwujud dengan terciptanya laporan yang andal, akurat dan tersedia secara tepat waktu.

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah diperoleh hasil analisis data dan pembahasan hasil telah dijelaskan, maka simpulan dari penelitian ini adalah: pertama, sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan barang milik daerah. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dengan baik akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah yang dihasilkan. Kedua, kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan barang milik daerah. Artinya semakin baik kemampuan sumber daya manusia yang mengerjakan laporan barang milik daerah, maka kualitas

laporan barang milik daerah yang dihasilkan akan cenderung meningkat. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan barang milik daerah. Hal ini memberikan makna bahwa semakin baik teknologi informasi dimanfaatkan dalam penyusunan laporan barang milik daerah akan cenderung meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah yang dihasilkan.

Beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu: dalam rangka meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gianyar hendaknya lebih mengefektifkan implementasi unsur-unsur sistem pengendalian intern di lingkungan Pemda untuk melakukan kontrol dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah, dan secara rutin melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia penyusun laporan barang melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sosialisasi peraturan-peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.

Pemerintah Kabupaten Gianyar hendaknya juga meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyusun laporan barang milik daerah melalui peningkatan kualitas teknologi informasi yang dipergunakan, dengan melakukan perawatan dan perbaikan peralatan secara lebih terjadwal dan teratur. Ketiga variabel bebas yang diidentifikasi dalam penelitian ini baru dapat menjelaskan variabilitas variabel kualitas laporan barang milik daerah sebesar 76,5 %, sehingga penelitian selanjutnya dapat mempergunakan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada kualitas

laporan barang milik daerah, antara lain: komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan ukuran besaran SKPD.

REFERENSI

Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 5, No. 1.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.

Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali. 2015. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar TA 2014. Siaran Pers.

Darno. 2012. Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 1, No. 1, Semester Ganjil 2012/2013.

Deist, Franc Oise Delamare Le and Jonathan Winterton. 2005. What Is Competence?. *Human Resource Development International*, Vol. 8, No. 1, p 27-46.

Donaldson, Lex and James H Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return. *Australian Journal of Management*, Vol. 16, No. 1, p. 49-64.

Doyle, Jeffrey T., Weili Ge and Sarah McVay. 2007. Accruals Quality and Internal Control over Financial Reporting. *The Accounting Review*, Vol. 82, No. 5, p. 1141-1170.

Feng, Mei., Chan Li., Sarah E McVay and Hollis Skaife. 2015. Does Ineffective Internal Control over Financial Reporting affect a Firm's Operations? Evidence from Firms' Inventory Management. *The Accounting Review*, Vol. 90, No. 2, p. 529-557.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Grubisic, Mihaela., Mustafa Nusinovic and Gorana Roje. 2009. Toward efficient Public Sector Asset Management. *Financial Theory and Practice*, Vol. 33, No. 3, p. 329-362.

Hardiman Patrick., Arlene Lurie., Frank Dubas and David Schoen. 1985. Internal Control And Financial Integrity In Government Unit. *The CPA Journal (pre-1986)*, Vol. 55, p. 46-51.

Haryanto. 2013. Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kualitas Pelaporan Aset Daerah. *Artikel 2, Buku Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Hal. 30-51. Semarang : UNDIP Press.

Hullah, Abdurahman Rigel., Sifrid Pengemanan., Steven Tangkuman dan Novi Budiarmo. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsrat*, Vo. 3, No. 2, Hal 9-21.

Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak, 23-24 Juli 2008

Irwan, Deri. 2011. “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”. (*Tesis*). Padang : Universitas Negeri Padang.

Jogiyanto. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 2007. Yogyakarta: BPFE

Jones, Michael John. 2008. Internal Control, Accountability And Corporate Governance : Medieval And Modern Britain Compared. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol 21, No 7, p. 1052 – 1075.

Karmila, Amries Rusli Tanjung dan Edfan Darlis. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Sorot Universitas Riau*, Vol. 9, No. 1, Hal. 25-42.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua*. Jakarta : Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

I Wayan Subrata, Gerianta Wirawan Yasa dan Ida Bagus Putra Astika, Pengaruh...

Laksamana, Arsono dan Muslichah. 2002. Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 4, No. 2, Hal. 106-125.

Macmillan, Graeme. 2003. Improving Government Financial Reporting : The Windows to Good Governance. *The Governance Brief*, Vol. 9, June 2003.

Mahaputra, I Putu Upbayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 2, Hal. 230-244.

McMullen, Dorothy A., K Raghunandan and D V Rama. 1996. Internal Control Report and Financial Reporting Problems. *Accounting Horizon*, Vol. 10, No. 4, p. 67-75.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Morgan, Douglas., Kelly G Bacon., Ron Bunch., Charles D Cameron and Robert Deis. 1996. What Middle Managers Do In Local Government: Stewardship of The Public Trust and Limits of Reinventing Government. *Public Administration Review*, Vol. 56, No. 4, p. 359-366.

Nurillah, As Syifa dan Dul Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Vol. 3, No. 2, Hal. 200-212.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

_____. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

_____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Podrug, N. 2011. The Strategic Role Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving Corporate Citizenship. *Ekonomski Pregled*. Vol. 62 (7-8), p. 404-420.

Pratiwi, Widya. 2012. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian intern (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Bungo). *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*, Vol. XII, No. 2, p. 82-103.

Putra, Ardiansyah. 2012. "Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun". (Tesis). Medan : Universitas Sumatera Utara.

Rynandi, Oscar. 2008. Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Barang Milik Negara pada Sektor Publik : Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 6, No. 1.

Scott, William R. 2009. *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Canada : Prentice Hall.

Slyke, David M Van. 2006. Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, No. 17, p. 157-187.

Stigler, G. 1971. The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol. 2, No. 1, p. 3-21

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI

Tama, Putu Ghea Permana. 2015. "Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gianyar". (Tesis). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Tjiptoherijanto, Prijono dan Sutystie Soemitro. 2001. *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cita Putra Bangsa.

Wansyah, Hendra., Darwanis dan Umar Bakar. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 1, Hal. 43-58.

Wibisono, Tri. 2009. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Aset Negara. *Warta Pengawasan*, Vol. XVI, No. 2, Juni 2009, BPKP.

Wu, Angela Jing. 2008. The Integrating the AICPA Core Competencies into Classroom Teaching: A Practitioner's Experiences in Transitioning to Academia. *The CPA Journal*, Vol. 78, No. 8.

Xu, Hongjiang., Jeretta Horn Nord., G Daryl Nord dan Bishan Lin. 2003. *Key Issues of Accounting Information Quality Management : Australian Case Studies*. Industrial Management & Data Systems; 2003; 103, 7; ProQuest pg. 461

I Wayan Subrata, Gerianta Wirawan Yasa dan Ida Bagus Putra Astika, Pengaruh...

Yudianta, I Gede Agus dan Ni Made Adi Erawati. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 1, No. 1.